

**DIGITAL SECURITY AND INCLUSIVE INTERNET  
LAUNCHING PLATFORM GET SAFE  
ONLINE**

**OGI NEWS**

MAY 05, 2021



**INCLUSIVE ISSUE**

Kedutaan Inggris bersama SAFEnet Indonesia mengadakan webinar dengan tema "Keamanan Digital & Internet Inklusif" pada hari Selasa, 20 April 2021. Webinar ini bertujuan untuk mendiskusikan isu-isu keamanan digital dan ruang internet yang aman untuk wanita dalam pencegahan kasus online gender-based violence ("OGBV") atau kekerasan berbasis gender online. Webinar ini juga merupakan rangkaian dari launching platform getsafeonline dari pemerintah Inggris, dimana platform ini ditujukan untuk meningkatkan awareness untuk isu – isu yang berhubungan dengan ruang digital.

The British Embassy together with SAFEnet Indonesia successfully held a webinar under the theme of "Digital Security & Inclusive Internet" on Tuesday, April 20, 2021. This webinar aimed to discuss issues of digital security and safe internet space for women in the preventing cases of online gender-based violence ("OGBV"). This webinar is also a part of the launching of the getsafeonline website platform from the UK government, where this platform is aimed at increasing awareness of issues related to the digital space.

Pembicara pertama adalah H.E Owen Jenkins, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste. Menurut Duta Besar Inggris, internet merupakan komoditas yang sangat berkembang di Indonesia. Pada tahun 2025, 89% masyarakat Indonesia akan terserap ke dalam ekosistem internet. Hal ini membuat kita harus mulai memikirkan dampak buruk dari ruang digital dan memikirkan mekanisme untuk melindungi masyarakat dari dampak terkait, tanpa melupakan bahwa internet harus bersifat terbuka, menarik, dan melindungi hak-hak berekspresi masyarakat Indonesia.

Duta Besar Inggris menjelaskan bahwa adanya peningkatan dalam tingkat keprihatinan publik tentang bahaya ruang online. Untuk hal ini, beliau menambahkan bahwa pemerintah perlu mengambil tindakan tegas untuk menjadikan Inggris sebagai tempat paling aman untuk masyarakatnya beraktivitas di ruang digital. Namun, karena internet merupakan fenomena global, dibutuhkan sebuah kolaborasi antar negara untuk memastikan bahwa tidak ada negara yang tertinggal di dalam perjuangan untuk menjaga keamanan dan inklusivitas ruang digital.

Terkait hal ini, Pemerintah Indonesia dan Inggris harus bekerja sama dalam melindungi ruang siber. Untuk hal ini, Pemerintah Inggris dengan bangga dapat bekerja sama dengan SAFEnet Indonesia untuk program Awas Kekerasan Berbasis Online (KBBO), rangkaian dari program Get Safe Online yang akan dirilis Indonesia, sebagai bentuk peningkatan awareness terhadap isu digital khususnya kekerasan online berbasis gender.

The first speaker was H.E Owen Jenkins, British Ambassador to Indonesia and Timor Leste. According to the British Ambassador, the Internet is a highly developing commodity in Indonesia. By 2025, 89% of Indonesians will be included into the digital ecosystem. This would mean that we have to start thinking about the negative implications of the digital space and the mechanism to protect society from related impacts without neglecting the idea that the Internet must be open, vibrant, and protecting the right of self expression of the Indonesian people.

The British Ambassador explained that there is an increasing level of public concern about the dangers of online space. For this, he further stated that the British government has to take firm action to make Britain the safest place for their citizen to operate within the digital space. However, due to the fact that the Internet is a global phenomenon, collaboration between countries is needed to ensure that no country is left behind in the struggle to maintain the security and inclusiveness of the digital space.

In this regard, the Indonesian and British governments must work together in protecting cyberspace. Regarding this matter, the British Government is proud to collaborate with SAFEnet Indonesia to increase the awareness of Online-Based Violence program, a series of the Get Safe Online program to be released in Indonesia as a manner to raise awareness of digital issues especially OGBV cases.

Pembicara pertama adalah H.E Owen Jenkins, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste. Menurut Duta Besar Inggris, internet merupakan komoditas yang sangat berkembang di Indonesia. Pada tahun 2025, 89% masyarakat Indonesia akan terserap ke dalam ekosistem internet. Hal ini membuat kita harus mulai memikirkan dampak buruk dari ruang digital dan memikirkan mekanisme untuk melindungi masyarakat dari dampak terkait, tanpa melupakan bahwa internet harus bersifat terbuka, menarik, dan melindungi hak-hak berekspresi masyarakat Indonesia.

Duta Besar Inggris menjelaskan bahwa adanya peningkatan dalam tingkat keprihatinan publik tentang bahaya ruang online. Untuk hal ini, beliau menambahkan bahwa pemerintah perlu mengambil tindakan tegas untuk menjadikan Inggris sebagai tempat paling aman untuk masyarakatnya beraktivitas di ruang digital. Namun, karena internet merupakan fenomena global, dibutuhkan sebuah kolaborasi antar negara untuk memastikan bahwa tidak ada negara yang tertinggal di dalam perjuangan untuk menjaga keamanan dan inklusivitas ruang digital.

Terkait hal ini, Pemerintah Indonesia dan Inggris harus bekerja sama dalam melindungi ruang siber. Untuk hal ini, Pemerintah Inggris dengan bangga dapat bekerja sama dengan SAFEnet Indonesia untuk program Awas Kekerasan Berbasis Online (KBBO), rangkaian dari program Get Safe Online yang akan dirilis Indonesia, sebagai bentuk peningkatan awareness terhadap isu digital khususnya kekerasan online berbasis gender.

The first speaker was H.E Owen Jenkins, British Ambassador to Indonesia and Timor Leste. According to the British Ambassador, the Internet is a highly developing commodity in Indonesia. By 2025, 89% of Indonesians will be included into the digital ecosystem. This would mean that we have to start thinking about the negative implications of the digital space and the mechanism to protect society from related impacts without neglecting the idea that the Internet must be open, vibrant, and protecting the right of self expression of the Indonesian people.

The British Ambassador explained that there is an increasing level of public concern about the dangers of online space. For this, he further stated that the British government has to take firm action to make Britain the safest place for their citizen to operate within the digital space. However, due to the fact that the Internet is a global phenomenon, collaboration between countries is needed to ensure that no country is left behind in the struggle to maintain the security and inclusiveness of the digital space.

In this regard, the Indonesian and British governments must work together in protecting cyberspace. Regarding this matter, the British Government is proud to collaborate with SAFEnet Indonesia to increase the awareness of Online-Based Violence program, a series of the Get Safe Online program to be released in Indonesia as a manner to raise awareness of digital issues especially OGBV cases.

Berdasarkan data dari Komisi Nasional Perempuan, terdapat 940 penambahan kasus OGBV di Indonesia pada tahun 2020, tiga kali lipat dari tahun 2019. Berdasarkan penghitungan dari LBH Apik, terdapat 307 kasus kekerasan seksual berbasis gender yang tercatat pada tahun 2020. Sesuai dengan informasi ini, BSSN mendukung pemerintah untuk membuat ruang digital yang aman demi realisasi ruang siber yang mumpuni.

Untuk hal ini, BSSN memiliki strategi untuk melanjutkan program melawan OGBV melalui strategi literasi dan konsultasi yang sebelumnya sudah diterapkan pada kampanye KLIKS BSSN dan kontak siber melalui nomor hotline yang disediakan oleh BSSN. Selanjutnya, BSSN juga membuat program baru yaitu Indonesian Women in Cyber Security (IWCS) untuk menambah partisipasi wanita dalam membuat ruang siber yang aman dan inklusif. Program ini ditujukan bagi wanita-wanita di Indonesia dengan berbagai latar belakang untuk saling bertukar ilmu pengetahuan dalam ranah keamanan siber. Sebagai pilot project, IWCS mengadaptasi beberapa pilar untuk program IWCS yaitu awareness, education, mentorship dan apprenticeship.

Selanjutnya, Veryanto Sitohang, Ketua Komisi Nasional Perempuan Indonesia menyatakan bahwa data Komnas Perempuan menyatakan adanya 1,983 kasus aktif kekerasan gender berbasis online. Data ini mematahkan data sebelumnya yang mana telah ada 350% kenaikan kasus dari tahun 2020. Sesuai dengan pemaparan beliau, masih terdapat beberapa rintangan dari upaya nasional untuk menanggulangi kasus OGBV di Indonesia.

Based on data from the National Commission on Women, there were 940 additional OGBV cases in Indonesia in 2020, three times that of 2019. Based on calculations from LBH Apik, there were 307 cases of gender-based sexual violence recorded in 2020. In accordance with this information, National Cyber & Crypto Agency aimed to support the government to create a safe digital space for the realization of a working cyber space.

For this, National Cyber & Crypto Agency has a strategy to continue the program against OGBV through literacy and consultation strategies. Previously, this has already been applied to the BSSN KLIKS campaign and cyber contact through the hotline number provided by National Cyber & Crypto Agency. Furthermore, National Cyber & Crypto Agency created a new program namely Indonesian Women in Cyber Security (IWCS) to increase women's participation in creating safe and inclusive cyber spaces. This program is aimed towards women in Indonesia with various backgrounds to exchange knowledge in the cybersecurity realm. As a pilot project, IWCS has adapted several pillars for the IWCS program namely awareness, education, mentorship and apprenticeship.

Furthermore, Veryanto Sitohang, Chair of the Indonesian National Commission for Women, stated that Komnas Perempuan's data stated that there were 1,983 active cases of online-based gender violence. This data prevails the previous data in which there has been a 350% increase in cases from 2020. In accordance with his presentation, there are still some obstacles from Indonesian's national efforts to tackle OGBV cases in Indonesia.

Hal tersebut meliputi upaya hukum yang terbatas bagi korban dan penyintas, ketersediaan badan yang bertanggung jawab akan kasus OGBV, dan mekanisme hukum yang dapat dilakukan bagi korban dan penyintas, khususnya proses digital tracing bagi pelaku.

Pemaparan dari pembicara selanjutnya yakni Ellen Kusuma selaku Kepala Sub Divisi Kekerasan Seksual Berbasis Online memaparkan bahwa, CSO telah mengambil peran dalam perjuangannya melawan OGBV dalam penyediaan kelas daring, penyediaan asistensi hukum untuk korban dan penyintas OGBV. Dalam realitanya, korban dan penyintas mengalami resiko kekerasan, persekusi hukum dan gangguan pada aspek psikis. Ellen mendukung adanya kooperasi lanjutan untuk beberapa badan dalam menanggulangi kasus OGBV.

Pada saat ini, SAFEnet telah mengeluarkan sebuah buku panduan yaitu NCII Guideline untuk membantu korban/penyintas dalam memahami pasal-pasal dari UU Informasi & Teknologi Elektronik (“UU ITE”) dan jalur hukum yang bisa ditempuh korban untuk mencari keadilan. Dalam buku panduan tersebut, terdapat panduan bagi komunitas untuk meminta bantuan pada penyedia platform PSE sebagai salah satu mekanisme prosedural dalam proses pembuktian, pemblokiran akun dan membatasi konten sensitif dalam penyebarannya di dunia maya.

This includes limited legal remedies for victims and survivors, the availability of bodies responsible for OGBV cases and legal mechanisms that can be implemented for victims and survivors, in particular the digital tracing process for perpetrators

The presentation from the next speaker, Ellen Kusuma as the Head of the Sub Division of Online-Based Sexual Violence from SAFEnet Indonesia explained that CSOs have played a role in their fight against OGBV in providing online classes, providing legal assistance for victims and survivors of OGBV. In reality, victims and survivors often experience the risk of violence, legal persecutions, and psychological disturbances. Ellen fully supports the continued cooperation for several agencies in tackling OGBV cases.

At this time, SAFEnet has already issued a guidebook namely the NCII Guideline, to assist victims/survivors in understanding the articles of the Information & Electronic Technology Law and the legal paths that victims can take to seek justice. In the guidebook, there is a guide for the community to ask for help from the PSE platform provider for procedural mechanism in the evidentiary process, blocking accounts and further blocking the content distribution in the cyberspace.

Beliau kemudian memaparkan bahwa pada realitanya, platform PSE memiliki jalur kerja sama khusus dengan kepolisian dalam penyelesaian kasus OGBV. Hal ini juga membangun urgensi akan perlunya peningkatan pendidikan mengenai kasus OGBV di Indonesia. Hal ini menyangkut dengan fakta bahwa kasus OGBV dapat menimpa siapapun tanpa memandang gender dari korban dan penyintas, apakah itu laki – laki, perempuan maupun gender non-binary lainnya.

Pendidikan ini ditujukan agar masyarakat Indonesia dapat menjadi lebih sensitif dan menunjukkan empati pada korban dan penyintas. Untuk hal ini, Ellen berharap bahwa SAFEnet dapat menjadi salah satu pelaku aktif dalam riset & pengembangan pengetahuan terkait OGBV di Indonesia dengan mengembangkan digital assistant yang ditujukan bagi korban dan penyintas dan juga penyediaan kelas daring untuk pihak – pihak yang membutuhkan.

Dalam penutup webinar ini, H.E Owen Jenkins memimpin launching dari platform website Get Safe Online. Di dalam website ini, terdapat penjelasan mengenai resiko–resiko ruang digital yang bersifat grup agnostic. Dalam hal ini, saran ditujukan bagi populasi general yang membutuhkan saran untuk kasus OGBV. Website diluncurkan bersama dengan SAFEnet Indonesia dalam bahasa Inggris dan Indonesia.

She then explained that in reality, PSE platform has a special line of cooperation with the police in resolving OGBV cases. This also builds the urgency of the need to improve literacy regarding OGBV cases in Indonesia. The urgency is related to the fact that OGBV cases can happen to anyone regardless of the gender of the victim and survivor whether they are male, female or other non-binary gender.

This education is targeted towards improving sensitivity and empathy for victims and survivors. For this issue, Ellen hopes that SAFEnet can become an active parties in the research process & development of knowledge related to OGBV in Indonesia, by developing digital assistants aimed at victims and survivors as well as providing online classes for those in need.

In the closing part of this webinar, H.E Owen Jenkins led the launch of the Get Safe Online website platform. On this website, there is an explanation of the risks of digital space that are group agnostic. In this event, the advice was aimed towards the general population who needs advice for OGBV cases. This Website was being launched jointly with SAFEnet Indonesia in English and Indonesian.

Di dalam Website ini, terdapat ratusan halaman konten yang ditujukan untuk menambah pengertian dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai kasus kekerasan seksual di dunia maya berdasarkan usia. Owen menjelaskan bahwa siapapun dapat mengakses platform ini bahkan pembaca usia muda, karena adanya pengaturan opsi saran berdasarkan umur dan pengenalan resiko yang telah tersedia di dalam platform. Owen pun berharap bahwa platform ini dapat menjadi salah satu solusi dalam penanggulangan kasus OGBV dan dalam jangka panjang dapat mengurangi stigma kepada korban dan penyintas kasus serta membuka diskusi yang lebih lanjut mengenai fenomena OGBV di tengah Masyarakat Indonesia.

On this website, there are hundreds of content aimed at increasing understanding and knowledge for the public regarding cases of sexual violence in cyberspace based on age criteria. Owen explained that anyone should be able to access this platform, even young readers due to the setting of age-based options and risk recognition that are available on this platform. Owen hoped that this platform can be one of the solutions in overcoming OGBV cases and in the long term, it can reduce the stigma of victims and survivors of OGBV cases and open further discussions about the phenomenon of OGBV in Indonesian society.